

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Penelitian sebelumnya memasukkan beberapa variabel sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela antara lain: ukuran perusahaan, *likuiditas*, *profitabilitas*, *leverage*, dan efisiensi terhadap pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian terdahulu diringkas pada tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel Y	Variabel X	Hasil Penelitian
1.	Nikita Atmalia, 2011; Pengaruh Tingkat <i>Profitabilitas</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur.	Luas pengungkapan sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Profitabilitas</i> (ROI)</li> <li>• <i>Leverage</i> (<i>Debt to total asset</i>)</li> </ul>	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>voluntary disclosure</i> .
2.	Nuryaman, 2009; Pengaruh Konsentrasi	Luas Pengungkapan sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsentrasi kepemilikan</li> </ul>	Konsentrasi kepemilikan, ukuran

	<p>Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Sukarela</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Komposisi dewan komisaris</li> <li>• Kualitas audit dengan proksi spesialisasi industry KAP</li> </ul>	<p>perusahaan, dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.</p>
3.	<p>Anita Yolanda Suta, 2012; Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Laporan Tahunan (Studi empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2010)</p>	<p>Luas pengungkapan informasi sukarela</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Umur perusahaan</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Ownership dispersion</i></li> <li>• <i>Net profit margin</i></li> <li>• <i>Return on equity</i></li> <li>• Likuiditas</li> <li>• Proporsi dewan komisaris independen</li> </ul>	<p>Variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela adalah ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan <i>likuiditas</i>. Sedangkan umur perusahaan, <i>ownership dispersion</i>, <i>net profit margin</i>, <i>return on equity</i>, dan proporsi</p>

				<p>dewan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.</p>
4.	<p>Nurseto Adhi, 2012; Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dan Implikasinya Terhadap <i>Asimetri Informasi</i> (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas pengungkapan</li> <li>• <i>Asimetri informasi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Umur listing</li> <li>• ROE</li> <li>• ROTA</li> <li>• Lingkup Bisnis</li> <li>• Ukuran KAP</li> </ul>	<p>Ukuran perusahaan, umur listing, ukuran kantor akuntan publik, dan lingkup bisnis perusahaan secara signifikan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Tingkat <i>leverage</i>, kinerja keuangan yang menggunakan ROE dan ROTA tidak secara signifikan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan.</p>
5.	Haryanto dan Ira	Luas	• Likuiditas	Tingkat likuiditas,

	Yunita, 2008; Analisis Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan (Studi empiris pada perusahaan real estat)	pengungkapan sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio <i>leverage</i></li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan berpengaruh, dan tingkat <i>profitabilitas</i> (ROE) secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan tahunan.
6.	Leony Lovancy Trisanti, 2012; Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi empiris pada perusahaan menufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2006-2010)	Kelengkapan pengungkapan sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio <i>likuiditas</i></li> <li>• Rasio <i>leverage</i></li> <li>• Rasio <i>profitabilitas</i></li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Status perusahaan</li> <li>• Umur perusahaan</li> <li>• Proporsi kepemilikan saham publik</li> </ul>	Rasio <i>likuiditas</i> , rasio <i>leverage</i> , rasio <i>profitabilitas</i> , ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, dan proporsi kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela. Secara parsial, hanya variabel rasio

				<p><i>profitabilitas</i>, proporsi kepemilikan saham oleh publik, dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan manufaktur.</p>
7.	<p>Bintang Bagus Wicaksono, 2011; Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan (Studi pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia)</p>	<p>Luas pengungkapan sukarela</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Tipe kepemilikan</li> <li>• Status perusahaan</li> <li>• Kinerja (<i>Profitabilitas</i>, <i>likuiditas</i>)</li> <li>• Pasar (ukuran KAP)</li> </ul>	<p>Secara serentak (uji f) indeks pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh seluruh variabel. Sedangkan (uji t) menunjukkan ada dua variabel yang signifikan yaitu variabel ukuran perusahaan dan tipe kepemilikan saham.</p>
8.	<p>Luciana Spica Almilia dan Ikka</p>	<p>Kelengkapan pengungkapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> </ul>	<p>Variabel yang mempengaruhi</p>

	Retrinasari, 2007; Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ	laporan keuanagn (pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio <i>leverage</i></li> <li>• Rasio <i>likuiditas</i></li> <li>• <i>Net profit margin</i></li> <li>• Status perusahaan</li> </ul>	kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio <i>likuiditas</i> , rasio <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan status perusahaan. Kelengkapan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh semua varibel bebas tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (wajib dan sukarela) adalah variabel rasio <i>likuiditas</i> , ukuran perusahaan dan status perusahaan yang berpengaruh signifikan.
9.	Ika Swasti Putri, 2010; Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan	Tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Likuiditas</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Profitabilitas</i></li> <li>• Ukuran perusahaan</li> </ul>	<i>Likuiditas</i> , kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak

<p>Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi empiris terhadap perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek Indonesia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial</li> <li>• Kepemilikan institusional</li> </ul>	<p>berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. <i>Leverage</i>, <i>profitabilitas</i>, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.</p>
--	--	---	--

Sumber: Data yang diolah, 2013

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian tentang pengungkapan sukarela. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain bertindak sebagai prinsipal. Eksposisi teoritis secara mendetail dari teori agensi pertama kali dinyatakan oleh Jansen dan Meckling (1976) dalam Fitriani (2001) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai `agen` dan pemegang saham sebagai `prinsipal`. Prinsipal bertindak sebagai penyedia fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan agen berkewajiban untuk mengelola dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang

merupakan `agen` dari pemegang saham. Manajer diwajibkan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada pemegang saham atas usaha yang dijalankan. Sedangkan pemegang saham memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan manajer melalui laporan keuangan yang disampaikan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen pada dasarnya bertindak memaksimalkan kepentingan sendiri. Tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik kepentingan. Manajer cenderung untuk memfokuskan pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dari pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Teori keagenan menggunakan insentif manajemen untuk menjelaskan pengungkapan sukarela. Waston et al., (2002) dalam Alfaiz (2013 ) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka bertindak secara optimal karena mereka tahu bahwa pemegang saham berusaha untuk mengendalikan perilaku mereka melalui kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan pengungkapan perusahaan. Adanya dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela didasarkan pada teori keagenan, yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Agen diharapkan dapat mengungkapkan informasi secara luas, sehingga bisa mengurangi konflik.

Teori keagenan tumbuh di masyarakat kapitalis di Eropa dengan kelangkaan kejujuran di dalam masyarakatnya, sehingga hubungan antara agen dan prinsipal didasari oleh ketidakpercayaan. Keterbukaan diperlukan antara prinsipal dan agensi, dengan keterbukaan akan mengurangi prasangka. Prasangka ini yang akan menimbulkan etika yang berdampak pada kecenderungan perilaku ketidakjujuran. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang menekankan nilai-nilai kejujuran, menggunakan teori keagenan dalam politik, ekonomi dan berorganisasi. Salah satu kondisi masyarakat ideal yang contohkan Islam adalah kondisi kota Madinah ketika dipimpin oleh Rasulullah SAW. Hubungan keagenan antara pihak yang memiliki sumber daya (prinsipal) dan pihak yang membutuhkan sumber daya (agen) dilandasi nilai-nilai kejujuran. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dapat digunakan sebagai dasar dari penerapan teori keagenan, sehingga hubungan antara agen dan prinsipal menjadi harmonis.

Perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Kejujuran merupakan dasar dalam kehidupan di masyarakat. Kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 119 berikut ini:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)”* (QS. At Taubah: 119)

Rasulullah bersabda, *“Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukan jalan ke surga, begitupula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub disisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, jangan berdusta, sebab dusta akan mengarahkan pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka, dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi*

*Allah sebagai pendusta*” (HR Bukhari Muslim dan Ibnu Mas`ud). ([http://pesantrenvirtual.com/indeks.php?option=com\\_content&task=view&id=524&Itemid=30](http://pesantrenvirtual.com/indeks.php?option=com_content&task=view&id=524&Itemid=30), diakses 13 Agustus 2013)

### 2.2.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori lain yang mendukung penelitian yaitu teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Freeman (1984) dalam Fitriani (2001), mengusulkan suatu teori umum dari perusahaan yang memasukkan akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Sejak saat itu bermunculan literatur berbasis teori pemangku kepentingan. Menurut Warsono et al., (2009) dalam Suta (2012) *stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah:

“pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan dan operasi suatu organisasi. Pemangku kepentingan perusahaan dapat meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesi dan asosiasi perdagangan, aktivitas sosial, dan organisasi non-pemerintahan.”

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai hubungan dengan banyak individu dan organisasi dalam masyarakat. Perusahaan harus menghasilkan laba bagi pemiliknya dan juga menciptakan nilai lain bagi masyarakat.

Menurut Rahmi (2010), *stakeholder* dalam Islam adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak. *Stakeholder* buhan hanya mereka yang berhubungan langsung dan tertera dalam kontra ataupun transaksi, tetapi juga mereka yang berhubungan tidak langsung. Ketika masyarakat bergerak secara bersama, maka konflik dapat diminimalisir. Masyarakat tidak lagi berebut dan berkompetisi secara tidak sehat, melainkan saling

bekerja sama dan bergotong royong. Sebagaimana yang terkandung dalam (QS. Ash Shaff, 4) berikut ini:

*“Sungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.”* (QS. Ash Shaff, 4)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat berkata, *“Aku ingin mengisolasi diri dari orang lain untuk menyembah Allah. Aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin dari Rosulullah SAW.”* Orang itu mengungkapkan keinginannya kepada Nabi, dan Nabi berkata. *“Jangan lakukan itu, berjuang dijalan Allah adalah lebih baik dari pada (hanya diam) berdoa di rumah selama tujuh puluh tahun.”* (HR Tirmidzi dan al-Hakim).

Oleh karena itu, segala tindakan manusia dalam kesehariannya sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan, melalui nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan, keadilan, penghormatan terhadap hukum, kebaikan, kesabaran, toleransi, dan moralitas, serta bukan dari kelicikan, kesombongan, berorientasi pada status kedudukan, pamer, ketidakpatuhan, iri, cemburu, ataupun menikam dari belakang (berkhianat).

Suatu perusahaan boleh saja memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan atau tetap pada upaya memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, asalkan dalam prosesnya tidak melakukan penyalahgunaan kepentingan, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

### **2.2.3. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan produk utama dari proses akuntansi yang merupakan instrument pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Dalam perpektif Islam pencatatan transaksi bisnis perusahaan merupakan

hal yang sangat penting. Pencatatan merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang menjadi kewajiban umat muslim untuk melaksanakannya.

Harahap (2008) menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al Qur'an. Kegiatan muamalah dalam ayat tersebut menjelaskan sebagian besar aktifitas manusia dan perusahaan, dengan demikian kegiatan pemeliharaan catatan dan akuntansi wajib hukumnya bagi perusahaan dan bahkan pribadi. Lebih lanjut Harahap (2008) menjelaskan bahwa dalam perpektif Islam akuntansi dilaksanakan dalam rangka menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya.

Sesuai dengan tujuan syariah yang berusaha untuk menciptakan masalah terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang didalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi, maka akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemberian informasi akuntansi melalui laporan keuangan harus dapat menjamin kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi, dimana inti prinsip ekonomi syariah menurut Al-Qur'an adalah: keadilan, kerjasama, keseimbangan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan syariah, eksploitasi dan segala bentuk penganiayaan (Harahap, 2008). Untuk mengakomodasi perkembangan industri yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip syariah, Ikatan

Akuntan Indonesia telah menetapkan standar penyajian laporan keuangan syariah sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 101. standar tersebut dimaksudkan untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Pengguna laporan dapat menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen sehingga dapat membuat keputusan ekonomi termasuk keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Al Qur'an adalah menyempurnakan pengukuran dalam pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Israa' ayat 35 sebagai berikut:

*“Dan sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. Al-Israa': 35)

#### **2.2.4. Pengungkapan Sukarela**

Kata *disclosure* dikaitkan dengan laporan keuangan mengandung arti penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi secara lengkap dan jelas, serta dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi suatu unit usaha. Meet et al (1995) dalam Suta (2012) menyebutkan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan bebas, dimana manajemen dapat memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pemakainya.

Manajer memiliki informasi lengkap mengenai kinerja perusahaan saat ini dan pada masa mendatang dibandingkan dengan pihak eksternal, namun manajer memiliki beberapa pertimbangan untuk melakukan pengungkapan tersebut. Suripto (1999) dalam Suta (2012) menyebutkan bahwa pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengungkapan tersebut.

Biaya pengungkapan sukarela berupa seluruh pengorbanan yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela. Menurut Elliot et al., (1994) dalam Suta (2012) biaya pengungkapan informasi terdiri dari:

1. Biaya pengembangan dan penyajian informasi yang meliputi biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan informasi (jika diperlukan), dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya litigasi yang timbul karena aspek hukum. Biaya litigasi muncul ketika terdapat informasi negative tentang perusahaan atau pengungkapan informasi yang menyesatkan. Manajer meningkatkan pengungkapannya dengan maksud untuk menurunkan risiko terhadap tuntutan hukum, karena ketika informasi negative tersebut ditunda untuk diungkapkan akan berpotensi munculnya kerugian terhadap beberapa pihak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan terkena masalah hukum.
3. Biaya *competitive disadvantage* yaitu kerugian yang timbul akibat pengungkapan informasi yang melemahkan daya saing perusahaan seperti informasi tentang inovasi teknologi dan manajerial serta informasi tentang strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar baru.

Besarnya biaya dan manfaat pengungkapan informasi antar perusahaan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bagi perusahaan besar, biaya pengungkapan informasi cenderung lebih rendah karena terdapat unsur biaya tetap. Oleh karena itu biaya dan manfaat

pengungkapan sukarela kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga akan mengakibatkan perbedaan luas pengungkapan dalam laporan tahunan antara perusahaan satu dengan yang lainnya.

Dalam pandangan Islam, penyajian laporan keuangan tidak boleh ada unsur penipuan atau adanya menyembunyian atas informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Ketidakjelasan terjadi apabila ada pihak yang merubah sesuatu yang seharusnya dilaporkan menjadi tidak dilaporkan. Dalam Al-Qur`an dijelaskan pencatatan laporan harus pasti dan tidak ada unsur penipuan, ayat yang menjelaskan yaitu surah Asy-Syuara` ayat 181-183 sebagai berikut:

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”* (Asy-Syuara` ayat 181-183)

#### **2.2.5. Ukuran perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar asset, maka semakin banyak modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dan kapitalisasi pasar dari ketiga variabel tersebut, nilai asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Putranto 2013).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapasitas pasar, dan lain sebagainya (Pramono, 2011 dalam Putranto, 2013). Menurut McNally et al., (1982) dalam Suta (2012) ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang dominan dalam praktik pengungkapan oleh karena tekanan yang dialami perusahaan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi yang dipaparkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Suta (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih banyak mendapatkan sorotan daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga perlu dilakukan pengungkapan informasi yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan. Menurut Amran *et al.* (2009) dalam Suta (2012) semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin meningkat pula jumlah *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan keterlibatan jumlah *stakeholder* tersebut, kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi akan menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

Islam memerintahkan untuk menggunakan harta pada tempatnya dan secara baik, serta tiak memboroskannya. Bahkan memerintahkan untuk menjaga dan memeliharanya. Al Qur`an melarang pemberian harta kepada pemiliknya sekalipun, apabila sang pemilik dinilai boros, atau

tidak pandai mengurus hartanya. Al Qur`an berpesan kepada mereka yang diberi amanat memelihara harta seseorang:

“*Janganlah kamu memberi orang-orang yang lemah kemampuan (dalam pengurusan harta) harta (mereka yang ada di tangan kamu dan yang dijanjikan Allah untuk semua sebagai sarana pokok kehidupan)*” (QS. An-Nisa:5).

Karena harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati,

maka berulang-ulang Al Qur`an dan hadits memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh kegemerlapan uang, atau diperbudak olehnya sehingga menjadikan seseorang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. (<http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Ekonomi1.html>, diakses 20 Agustus 2013)

#### **2.2.6. Likuiditas**

Menurut Darmawi (2011) *likuiditas* adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan asset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Bank dianggap likuid jika bank mempunyai cukup uang tunai atau asset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lain, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. Tingkat *likuiditas* mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang menggambarkan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Tingkat *likuiditas* yang tinggi akan menunjukkan kekuatan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Cooke (1989) dalam Tristanti (2012), perusahaan

dengan tingkat *likuiditas* yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan informasi secara sukarela yang lebih luas kepada pihak luar.

Islam sangat memperhatikan masalah utang-piutang. Utang (*qardh*) merupakan harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali dengan nilai yang sepadan. Landasan syariah transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ijma para ulama. Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”* (QS. Al-Hadid: 11)

Dan dalam sebuah hadits dari sunnah Rasul, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

*“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh”* (HR Ibnu Majah).

Ijma para ulama pun telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

### **2.2.7. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba atau profit. Profitabilitas yang meningkat dapat berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan ini dapat dari pemegang saham, kreditur, serta

pemangku kepentingan lainnya. Seiring meningkatnya sumber pendanaan perusahaan, maka ragam pemangku kepentingan akan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan pengungkapan informasi perlu dilakukan. Pengungkapan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian yang akan dilakukan profitabilitas diprosikan dengan menggunakan ROA.

*Profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Muhammad et al (2009) dalam Putranto (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Manajemen terpacu mengungkapkan informasi untuk mengurangi risiko pandangan negative pasar terhadap kualitas investasi, sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dana dengan biaya yang rendah dan menghindari terjadinya penurunan harga saham. Profitabilas margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci untuk menggambarkan kemampuan memaksimalkan nilai pemegang saham dan meningkatkan kompensasi manajemen. Manajer perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan merasa bangga dengan hasil pencapaiannya, sehingga cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memberikan kesan positif kinerja yang dicapainya dengan harapan mendapatkan timbal balik berupa peningkatan kompensasi.

Adapun hadits yang berkaitan dengan laba adalah hadits riwayat Bukhori dan Muslim yaitu:

*“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal*

*pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.” (HR Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa laba ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Qur'an, yaitu pertambahan (kelebihan) dari modal pokok. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Syahatah (2001) bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

#### **2.2.8. Leverage**

*Leverage* merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Bringham dan Houston (2006) dalam Suta (2012) rasio-rasio *leverage* memiliki sejumlah implikasi. Pertama, dengan memperoleh dana dari utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dan membatasi investasi yang mereka berikan. Kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas, sebagai batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang harus dihadapi oleh kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengambilan dari modal pemilik akan diperbesar. Untuk itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi

memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memenuhi kebutuhan kreditor terhadap informasi. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya rentan terhadap biaya agensi, yaitu biaya pengawasan yang semakin tinggi.

Menurut Fama dan Miller (1972) dalam Suta (2012), biaya agensi yang tinggi, pada dasarnya, menunjukkan hubungan yang positif antara pengungkapan sukarela dan *leverage*. Menurut Meek, *et al.*, 1995 dalam Suta (2012) menegaskan bahwa, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka akan semakin luas pula pengungkapan informasi yang diungkapkan perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor.

#### **2.2.9. Efisiensi**

Rasio efisiensi sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) sering disebut rasio efisiensi, yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektifitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap yang lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka neraca. Semakin kecil rasio ini berarti

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. ([www.bi.go.id/web/id/kamus](http://www.bi.go.id/web/id/kamus), diakses 9 November 2013)

Menurut Riyadi (2006) BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Beban operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.

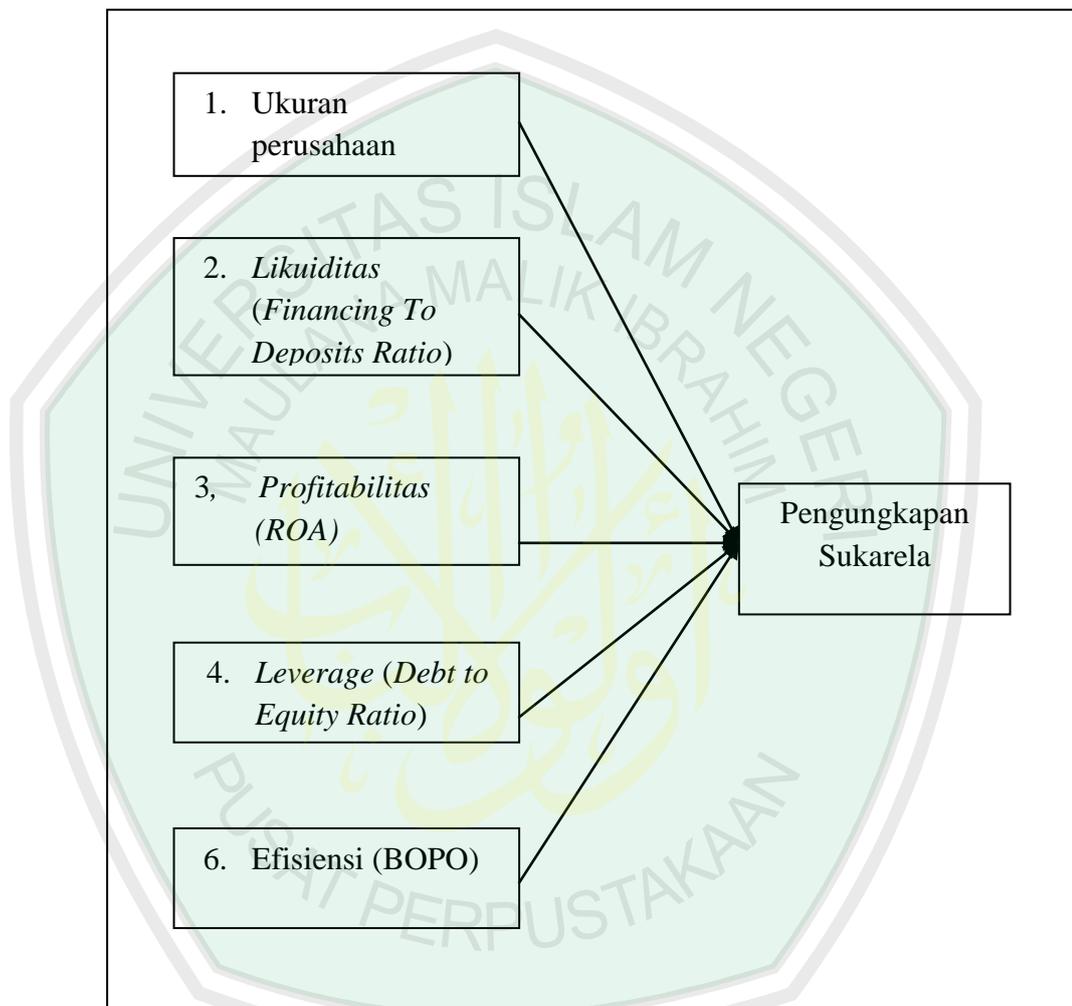
### **2.3 Kerangka Berfikir**

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan bank syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian yaitu pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian antara lain ukuran perusahaan, *likuiditas*, *profitabilitas*, *leverage*, dan BOPO.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**



*Sumber: Data yang diolah, 2013*

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar akan mengungkapkan pengungkapan sukarela lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam hubungannya dengan pengungkapan sukarela. Menurut Meek et. Al (1995) dalam Tristanti (2012), kemampuan perusahaan besar untuk merekrut karyawan yang ahli serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analisis membuat perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan secara sukarela yang lebih luas daripada perusahaan kecil. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Suta (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung lebih banyak mendapat sorotan public dan memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, sehingga perlu dilakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan. Penelitian mengenai ukuran perusahaan di lakukan oleh Nuryaman (2009) yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta (2012), Adhi (2012), Haryanto (2008), Tristanti

(2012), Wicaksono (2011), Almilia (2007) dan Putri (2010) yang menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela**

#### **2.4.2. Pengaruh *Likuiditas* Terhadap Pengungkapan Sukarela**

Tingkat *likuiditas* mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menggambarkan tingkat kesehatan bank. Perusahaan dengan tingkan *likuiditas* yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi secara sukarela yang lebih banyak kepada pihak luar (publik) untuk menunjukkan kondisi keuangan yang baik dan kinerja keuangan yang bagus. (Cooke (1998) dalam Tristanti (2012)). Peneliti yang menggunakan *likuiditas* sebagai variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela antara lain Suta (2012), Haryanto (2008), Tristanti (2012), dan Almilia (2007). Sedangkan dalam penelitian Putri (2012) menunjukan *likuiditas* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: *Likuiditas* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela**

#### **2.4.3. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Pengungkapan Sukarela**

*Profitabilitas* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, asset dan ekuitas. Menurut Singvi dan Desai (1971) dalam Tristansi (2012), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *profitabilitas* yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela karena ingin menunjukkan kepada publik dan stakeholder bahwa perusahaan memiliki tingkat *profitabilitas* yang tinggi dibandingkan perusahaan lain. Penelitian yang menggunakan *profitabilitas* sebagai variabel independen antara lain: Atmalia (2011) yang menunjukkan hasil *profitabilitas* tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2011), Tristanti (2012), Haryanto (2008). Sedangkan dalam penelitian Putri (2010) yang melakukan penelitian di perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela**

#### **2.4.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Sukarela**

*Leverage* adalah variabel yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu untuk menguji determinasi dari pengungkapan perusahaan. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai kewajiban jangka panjang. Menurut Bringham dan Huston (2006) dalam Suta (2012), perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memenuhi kebutuhan kreditor terhadap informasi. Peneliti yang menguji *leverage* sebagai variabel independen antara lain: Atmalia (2011) dengan hasil penelitian secara parsial, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta (2012), Haryanto (2008), Tristanti (2012), dan Putri (2010).

Sedangkan dalam penelitian Adhi (2012), Wicaksono (2011), Almilia (2007) *leverage* tidak secara signifikan mempengaruhi pengungkapan sukarela. Yang berarti semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin tinggi hutang perusahaan. Pada tingkat hutang yang tinggi, perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan pengungkapan karena

khawatir akan penialain investor terhadap kemampuan perusahaan mengembalikan hutang tersebut.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela**

#### **2.4.5 Pengaruh Efisiensi Terhadap Pengungkapan Sukarela**

Rasio efisiensi (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Menurut Riyadi (2006) BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: BOPO berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela**